



OPTIMALISASI PROGRAM DISEMINASI ISPA DI PUSKESMAS BONTANG BARAT

Oleh :

**NAMA PESERTA : FITRI MUTIAH SAPPEWALI
NDH : 15
PELATIHAN DASAR CALON PNS ANGKATAN V**

**PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN
KAJIAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
SAMARINDA**

2019



LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN AKTUALISASI

Yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa Laporan Aktualisasi Pelatihan Dasar Calon PNS Angkatan V Tahun 2019:

Nama : FITRI MUTIAH SAPPEWALI
NDH : 15
NIP : 19930329 201903 2028
Jabatan : Dokter Ahli Pertama
Instansi : Pemerintah Kota Bontang
Judul Laporan Aktualisasi :

**“ OPTIMALISASI PROGRAM DISEMINASI INFEKSI SALURAN PERNAPASAN
AKUT (ISPA) DI PUSKESMAS BONTANG BARAT ”**

Dinyatakan LAYAK untuk diajukan dalam Seminar Hasil Aktualisasi pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019 bertempat di Kampus Puslatbang KDOD LAN.

Mentor,

Coach,

dr. Fatimah Asih Winaroyo
NIP. 19770617 2009032001

Andi Yakub, SP
NIP. 19770814 2011011001



LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN AKTUALISASI

Yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa Laporan Aktualisasi Peserta Pelatihan Dasar Calon PNS Angkatan V :

Nama : Fitri Mutiah Sappewali
NDH : 15
NIP : 19930329 201903 2028
Jabatan : Dokter Ahli Pertama
Instansi : Pemerintah Kota Bontang
Judul Rancangan Aktualisasi :

**“ OPTIMALISASI PROGRAM DISEMINASI INFEKSI SALURAN PERNAPASAN
AKUT (ISPA) DI PUSKESMAS BONTANG BARAT ”**

TELAH DISEMINARKAN dalam Seminar Hasil Aktualisasi pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019 bertempat di Kampus Puslatbang KDOD LAN.

Mentor,

Coach,

dr. Fatimah Asih Winaryo
NIP. 19770617 2009032001

Andi Yakub, SP
NIP. 19770814 2011011001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah swt, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan berkat, rahmat dan hidayah Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Aktualisasi ini tepat pada waktunya. Laporan aktualisasi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Angkatan V Tahun 2019 Pemerintah Kota Bontang yang diselenggarakan di Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara di Samarinda.

Dalam melaksanakan kegiatan aktualisasi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan, bantuan dan dukungan dari banyak pihak sehingga laporan ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu dalam kesempatan kali ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Mariman Darto, M.Si selaku Kepala Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara Kalimantan Timur beserta jajarannya yang telah memfasilitasi penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS Golongan III.
2. Pemerintah Kota Bontang.
3. dr. Fatimah Asih Winaryo selaku mentor atas semua dukungan, arahan, motivasi, masukan dan bimbingan selama perancangan program aktualisasi sampai dengan kegiatan tersebut terealisasikan.
4. Bapak Andi Yakub, SP selaku coach atas semua inspirasi, dorongan, masukan serta bimbingan yang diberikan dalam membuat laporan kegiatan aktualisasi ini.
5. Seluruh Widyaswara yang telah membimbing dan memberikan pengarahan terkait materi ANEKA untuk dapat diinternalisasikan dan diaktualisasikan di instansi

6. Seluruh Panitia yang telah membantu memfasilitasi kegiatan Pelatihan Dasar CPNS
7. Seluruh staff Puskesmas Bontang Barat.
8. Keluarga Besar Peserta Pendidikan Dasar CPNS Golongan III Angkatan V Tahun 2019

Penulis sadar bahwa Laporan Aktualisasi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena ini penulis mengharapkan masukan dari berbagai pihak agar Laporan Aktualisasi ini menjadi lebih baik sehingga dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan dan pelaporan aktualisasi nilai dasar ASN, serta memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Samarinda, 20 Oktober 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
LEMBAR KONSULTASI COACH	iv
LEMBAR KONSULTASI MENTOR	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	3
1.3. Manfaat	4
1.4. Ruang Lingkup.....	4
BAB II GAMBARAN UMUM ORGANISASI	
2.1. Kondisi Umum dan Wilayah Kerja Puskesmas Bontang Barat	5
2.2. Struktur Organisasi Puskesmas Bontang Barat	6
2.3. Visi dan Misi Puskesmas Bontang Barat	7
2.4. Tata Nilai Puskesmas Bontang Barat.....	7
2.5. Upaya Pelayanan Kesehatan Puskesmas Bontang Barat	8
2.6. Tugas dan Fungsi Dokter	9
BAB III LANDASAN TEORI	
3.1. Nilai Dasar CPNS	11
3.2. Kedudukan dan Peran ASN dalam NKRI.....	15
BAB IV RANCANGAN KEGIATAN AKTUALISASI	
4.1. Identifikasi Isu	21
4.2. Isu Prioritas	21
4.3. Isu Terpilih.....	22

4.4. Uraian Kegiatan	24
BAB V HASIL KEGIATAN AKTUALISASI	
Pelaksanaan Kegiatan Aktualisasi.....	31
BAB VI PENUTUP	
6.1.Kesimpulan	47
6.2.Saran.....	47
6.3.Rencana Tindak Lanjut	47
DAFTAR PUSTAKA	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan suatu bangsa yang besar dengan kekayaan alam yang melimpah. Indonesia sebagai bangsa dan negara terus berupaya mengelola sumber daya yang dimiliki untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, termasuk memberikan jaminan terhadap kesehatan. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara ‘Republik Indonesia Tahun 1945.

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan pelayan masyarakat / abdi negara yang memiliki tanggung jawab terhadap pelayanan publik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai ASN dalam bidang kesehatan, ASN memiliki peran penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat agar masyarakat mampu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat sehingga akan terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi serta sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sejalan dengan telah ditetapkannya UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan merujuk pada pasal 63 ayat 3 dan 4; CPNS wajib menjalani masa percobaan yang dilaksanakan melalui proses Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat, dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Penyelenggaraan Diklat ini bertujuan agar para peserta mampu menginternalisasi nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam penerapan aktualisasi. Nilai-nilai dasar profesi yang harus dimiliki oleh seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional dan berkarakter diantaranya:

1. **Akuntabilitas**, merupakan kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai dalam menjalankan tugas serta kewenangan;

2. **Nasionalisme** yaitu pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara, serta sekaligus menghormati bangsa lain;
3. **Etika Publik** merupakan refleksi atas baik/buruk, benar/salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik/benar.
4. **Komitmen Mutu** yaitu komitmen terhadap pelayanan kepada masyarakat yang berorientasi terhadap mutu pelayanan yang prima;
5. **Anti Korupsi** adalah sifat menjauhkan diri dari kecurangan dalam bentuk gratifikasi atau tindak kecurangan lain dalam menjalankan tugas dan kewenangan yang dapat merugikan bangsa dan negara.

Pelayanan Kesehatan merupakan pelaksanaan pemeliharaan kesehatan dalam rangka mencapai derajat kesehatan baik individu maupun masyarakat secara optimal. Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas merupakan ujung tombak fasilitas kesehatan yang memiliki peluang besar untuk bersentuhan langsung dengan masyarakat baik yang sehat maupun sakit. Permasalahan di bidang pelayanan kesehatan masyarakat sangat luas dan kompleks, sehingga dalam pemecahannya melibatkan berbagai lintas sektor dan berbagai disiplin ilmu. Melalui upaya peningkatan pemahaman kesehatan (promotif), upaya pencegahan (preventif), dan upaya pengobatan (kuratif) demi membangun ketahanan nasional bidang kesehatan.

ISPA adalah penyebab utama morbiditas dan mortalitas penyakit menular di dunia. Hampir empat juta orang meninggal akibat ISPA setiap tahun, 98% diantaranya disebabkan oleh infeksi saluran pernapasan bawah. Tingkat mortalitas sangat tinggi pada bayi dan anak-anak, dan lanjut usia, terutama di negara-negara dengan pendapatan per kapita rendah dan menengah. ISPA masih merupakan penyakit utama penyebab kematian bayi dan balita di Indonesia. Dari beberapa hasil Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) diketahui bahwa 80-90% dari seluruh kasus kematian ISPA disebabkan oleh pneumonia.⁽³⁾

Sehubungan dengan kegiatan *off campus* peserta Pendidikan dan Pelatihan Dasar CPNS Pemerintah Kota Bontang tahun 2019, diharapkan dapat melakukan kegiatan aktualisasi. Melalui Optimalisasi Program Diseminasi Infeksi Saluran Pernapasan Akut

diharapkan dapat membantu upaya promotif preventif pencegahan penyakit ISPA di Puskesmas Bontang Barat.

1.2 Tujuan

1.2.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari kegiatan ini yaitu untuk menginternalisasi dan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN yaitu berupa Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi sehingga mampu menjadi kebiasaan dalam bekerja dan akhirnya mampu melaksanakan tugas dan perannya secara bertanggung jawab professional.

1.2.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak di capai adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memahami konsepsi pembelajaran habituasi;
- b. Untuk memahami tahapan kegiatan pembelajaran aktualisasi; dan
- c. Untuk melaksanakan tahapan pembelajaran aktualisasi:
 - menyusun rancangan aktualisasi;
 - mempresentasikan rancangan aktualisasi;
 - melaksanakan aktualisasi;
 - menyusun laporan aktualisasi;
 - mempresentasikan laporan aktualisasi.

1.3 Manfaat

Aktualisasi ini sebagai wadah untuk menerapkan ilmu dan pengetahuan yang telah didapatkan dari pelatihan dasar, dan diharapkan dapat terus dikembangkan untuk mencapai tujuan ASN sebagai sumber daya manusia unggul menuju Indonesia maju.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang Lingkup kegiatan ini meliputi aktualisasi latihan dasar sebagai pembelajaran agenda Sikap Perilaku Bela Negara, Nilai-Nilai Dasar PNS, peran dan kedudukan PNS dalam NKRI.

BAB II

GAMBARAN UMUM ORGANISASI

2.1 Kondisi Umum dan Wilayah Kerja Puskesmas Bontang Barat

Puskesmas Bontang Barat, lokasinya berada di Kelurahan Kanaan tepatnya di Jalan Damai RT 11 No 41/42 dengan luas wilayah kerja Puskesmas adalah 17,2 km², dan wilayah terluas berada di kelurahan Belimbing.

Puskesmas Bontang Barat merupakan Puskesmas yang resmi menjadi Puskesmas induk pada tanggal 02 Januari 2012 berdasarkan Peraturan Walikota No.2 Tahun 2012. Perwal Bontang No.9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata kerja UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Bontang. Berdasarkan Perwali tersebut, pelayanan yang terdapat di Puskesmas saat ini mencakup pelayanan yang bersifat promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Puskesmas Bontang Barat memiliki 3 wilayah kerja yang meliputi Kelurahan Kanaan, Gunung Telihan dan Belimbing dengan luas wilayah keseluruhan mencapai 17,2 km².

Gambar 2.1 Peta dan Batas wilayah kerja Puskesmas Bontang Barat



- Utara : Berbatasan dengan Kab. Kutai Timur.
- Selatan : Berbatasan dengan Kec. Bontang Selatan.
- Timur : Berbatasan dengan Selat Makassar.
- Barat : Berbatasan dengan Kab. Kutai Timur.

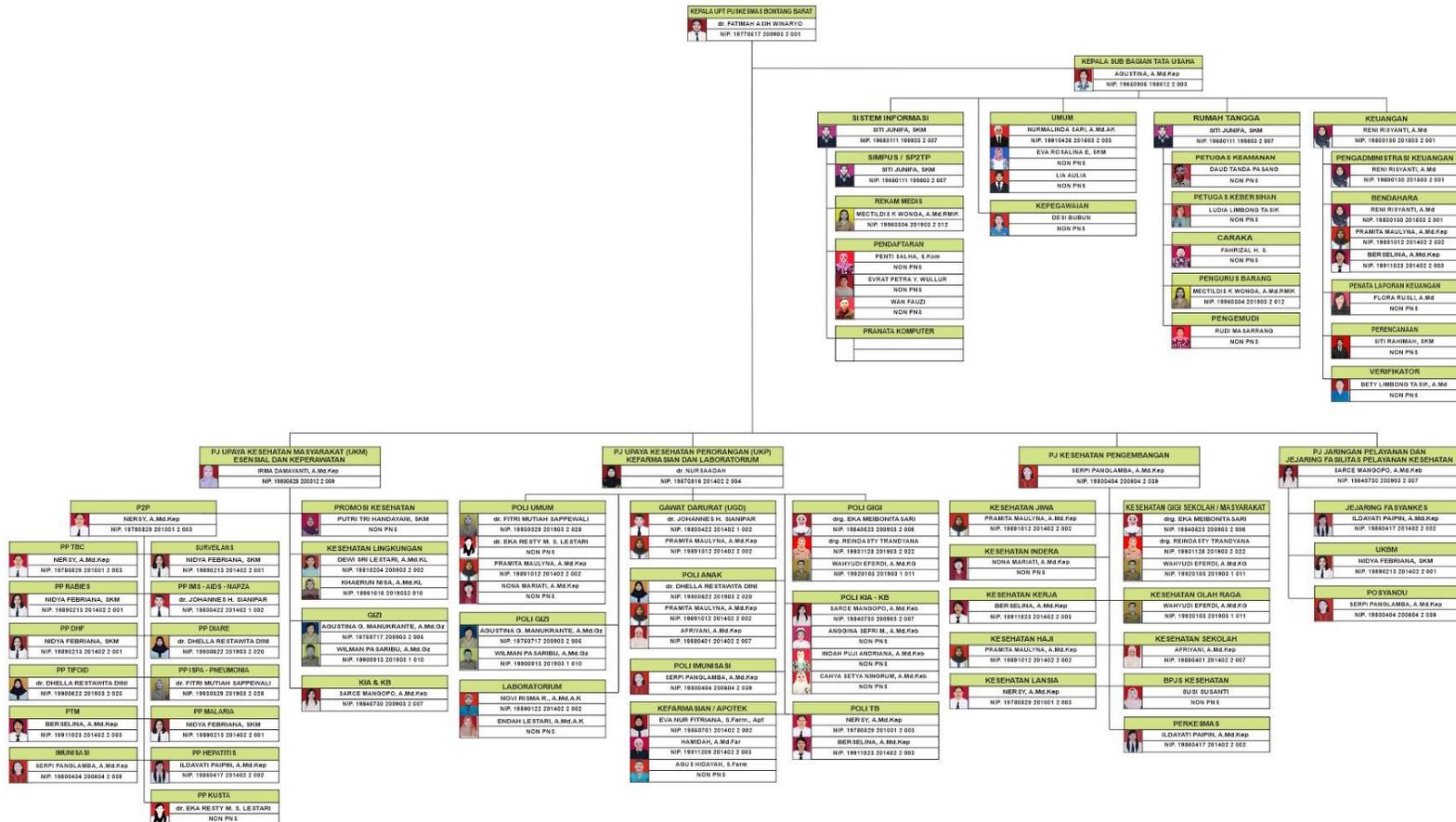
Berdasarkan data dari Disdukcapil Kota Bontang Tahun 2018, jumlah penduduk di Kecamatan Bontang Barat sebanyak 29.803 jiwa dengan jumlah penduduk tertinggi berada di wilayah Kelurahan Belimbing.

2.2 STRUKTUR ORGANISASI

Kepala UPT Puskesmas Bontang Barat : dr. Fatimah Asih Winaryo

Kepala Sub. Bag. Tata Usaha : Agustina, Amd. Kep

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Puskesmas Bontang Barat



2.3 VISI & MISI PUSKESMAS BONTANG BARAT

Visi Puskesmas Bontang Barat adalah “*Terwujudnya Puskesmas Bontang Barat Berpelayanan Prima dan Masyarakat Bontang Barat Sehat yang Mandiri*”

Untuk mencapai visi tersebut, maka misi yang ditetapkan oleh Puskesmas Bontang Barat adalah:

- 1) Meningkatkan derajat kesehatan dengan pemberdayaan masyarakat
- 2) Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan
- 3) Memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas
- 4) Mewujudkan kesadaran pembangunan masyarakat yang berwawasan kesehatan.

2.4 TATA NILAI PUSKESMAS BONTANG BARAT

Dalam mewujudkan visi dan misi dengan berbagai nilai dasar yang dijadikan pegangan dan dijiwai bagi seluruh karyawan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, di UPT Puskesmas Bontang Barat ditetapkan “**CERDAS, EMPATI, RAMAH, INOVATIF, ANTUSIAS**” sebagai budaya kerja/ tata nilai dengan penjabaran sebagai berikut :

- 1) Cerdas

Cerdas adalah seseorang yang memiliki 3 hal pokok dalam dirinya, yaitu *Skill, Knowledge, dan Attitude*. *Skill* berarti adalah seseorang itu benar-benar ahli di bidangnya. *Knowledge* berarti orang tersebut menguasai, minimal tahu dan berwawasan tentang ilmu – ilmu yang berhubungan dengan bidangnya. Dan yang terakhir *Attitude*, bukan hanya pintar dan cerdas tapi dia juga punya etika yang diterapkan dalam bidangnya.

- 2) Empati

Sikap memperhatikan dan memahami terhadap sesama petugas dan masyarakat sebagai sasaran pengguna layanan puskesmas.

3) Ramah

Baik hati dan menarik budi bahasanya, manis tutur kata dan sikapnya, dan menyenangkan dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat.

4) Inovatif.

Kreatif melakukan kegiatan – kegiatan baru dalam menyelesaikan segala permasalahan kesehatan yang terjadi dalam masyarakat.

5) Antusias

Selalu bersemangat dalam melaksanakan tugas-tugas, dan juga dalam melayani kebutuhan pengguna layanan puskesmas.

2.5 UPAYA PELAYANAN KESEHATAN PKM BONTANG BARAT

Pelayanan kesehatan yang diberikan di Puskesmas Bontang Barat meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Usaha pokok Puskesmas Bontang Barat ialah bertanggung jawab menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Puskesmas Bontang Barat merupakan fasilitas kesehatan tingkat pertama yang melakukan Upaya Kesehatan Wajib dan Upaya Kesehatan Pengembangan, seperti yang tertera berikut ini:

1. Upaya Kesehatan Wajib

Upaya kesehatan wajib Puskesmas adalah upaya yang harus diselenggarakan oleh setiap Puskesmas, meliputi :

- a. Upaya Promosi Kesehatan
- b. Upaya Kesehatan Lingkungan
- c. Upaya Kesehatan Ibu dan Anak serta Keluarga Berencana
- d. Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat
- e. Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular
- f. Upaya Perawatan Kesehatan Masyarakat (PERKESMAS)
- g. Upaya Pengobatan

2. Upaya Kesehatan Pengembangan

Upaya Kesehatan Pengembangan Puskesmas adalah upaya yang ditetapkan berdasarkan permasalahan kesehatan yang ditemukan di masyarakat dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi Puskesmas, yang meliputi :

- a. Upaya Kesehatan Sekolah (UKS)
- b. Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut (UKGS)
- c. Upaya Kesehatan Remaja & PKPR
- d. Upaya Kesehatan Jiwa
- e. Upaya Kesehatan Mata
- f. Upaya Kesehatan Olahraga
- g. Upaya Kesehatan Lansia
- h. Pos Binaan Terpadu
- i. Pos Unit Kesehatan Kerja

Disamping itu upaya pencatatan dan pelaporan serta upaya laboratorium medis sederhana merupakan pelayanan penunjang dari setiap upaya kesehatan wajib dan upaya kesehatan pengembangan di Puskesmas Bontang Barat. Berikut merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Puskesmas Bontang Barat.

2.6 TUGAS DAN FUNGSI DOKTER

1. Melakukan Pelayanan Medik umum rawat jalan tingkat pertama
2. Melakukan tindakan khusus tingkat sederhana oleh dokter umum
3. Melakukan tindakan khusus tingkat sedang oleh dokter umum
4. Melakukan tindakan darurat medik/ pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) tingkat sederhana
5. Melakukan pemulihan mental tingkat sederhana
6. Melakukan penyuluhan medik
7. Membuat catatan medik rawat jalan
8. Melayani atau menerima konsultasi dari luar atau keluar
9. Melayani atau menerima konsultasi dari dalam

10. Menguji kesehatan individu
11. Menyusun program kerja program pengendalian dan pemberantasan penyakit menular (Program ISPA/ Pneumonia)
12. Mengevaluasi dan menyusun laporan program pengendalian dan pemberantasan penyakit menular (Program ISPA/ Pneumonia)

BAB III

LANDASAN TEORI

3.1 NILAI-NILAI DASAR PNS

3.1.1 Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kemampuan dalam menunjukkan laporan atau catatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Secara umum akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Asas Akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu seseorang yang mendapatkan amanat harus mempertanggungjawabkannya kepada orang-orang yang memberinya kepercayaan.

Amanah seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nilai-nilai publik tersebut antara lain adalah:

- a. Mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan, antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi;
- b. Memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis;
- c. Memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
- d. Menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan.

Adapun Nilai-nilai yang terkandung dalam Akuntabilitas adalah sebagai berikut:

1. Kepemimpinan

Lingkungan yang akuntabel dapat tercipta dari seorang pemimpin yang menjadi sosok teladan bagi pegawai lainnya, sehingga pemimpin memainkan peranan yang penting dalam menciptakan lingkungannya.

2. Transparansi

Tujuan dari adanya transparansi adalah:

- a. Mendorong komunikasi yang lebih besar dan kerjasama antara kelompok internal dan eksternal;
- b. Memberikan perlindungan terhadap pengaruh yang tidak seharusnya dan korupsi dalam pengambilan keputusan;
- c. Meningkatkan akuntabilitas dalam keputusan-keputusan;
- d. Meningkatkan kepercayaan dan keyakinan kepada pimpinan secara keseluruhan.

3. Integritas

Dengan adanya integritas menjadikan suatu kewajiban untuk menjunjung tinggi dan mematuhi semua hukum yang berlaku, Undang-undang, kontrak, kebijakan, dan peraturan yang berlaku. Dengan adanya integritas institusi, dapat memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada publik dan/atau stakeholders.

4. Tanggungjawab (*Responsibilitas*)

Responsibilitas institusi dan responsibilitas perseorangan memberikan kewajiban bagi setiap individu dan lembaga, bahwa ada suatu konsekuensi dari setiap tindakan yang telah dilakukan, karena adanya tuntutan untuk bertanggungjawab atas keputusan yang telah dibuat. Responsibilitas terbagi dalam responsibilitas perorangan dan responsibilitas institusi.

5. Keadilan

Keadilan adalah landasan utama dari akuntabilitas. Keadilan harus dipelihara dan dipromosikan oleh pimpinan pada lingkungan organisasinya. Oleh sebab itu, ketidakadilan harus dihindari karena dapat menghancurkan kepercayaan dan kredibilitas organisasi yang mengakibatkan kinerja akan menjadi tidak optimal.

6. Kepercayaan

Rasa keadilan akan membawa pada sebuah kepercayaan. Kepercayaan ini yang akan melahirkan akuntabilitas. Dengan kata lain, lingkungan akuntabilitas tidak akan lahir dari hal-hal yang tidak dapat dipercaya.

7. Keseimbangan

Untuk mencapai akuntabilitas dalam lingkungan kerja, maka diperlukan adanya keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan, serta harapan dan kapasitas. Setiap individu yang ada di lingkungan kerja harus dapat menggunakan kewenangannya untuk meningkatkan kinerja. Adanya peningkatan kerja juga memerlukan adanya perubahan kewenangan sesuai kebutuhan yang dibutuhkan. Selain itu, adanya harapan dalam mewujudkan kinerja yang baik juga harus disertai dengan keseimbangan kapasitas sumber daya dan keahlian (skill) yang dimiliki.

8. Kejelasan

Kejelasan juga merupakan salah satu elemen untuk menciptakan dan mempertahankan akuntabilitas. Agar individu atau kelompok dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya, mereka harus memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang menjadi tujuan dan hasil yang diharapkan. Dengan demikian, fokus utama untuk kejelasan adalah mengetahui kewenangan, peran dan tanggungjawab, misi organisasi, kinerja yang diharapkan organisasi, dan sistem pelaporan kinerja baik individu maupun organisasi.

9. Konsistensi

Konsistensi menjamin stabilitas. Penerapan yang tidak konsisten dari sebuah kebijakan, prosedur, sumber daya akan memiliki konsekuensi terhadap tercapainya lingkungan kerja yang tidak akuntabel, akibat melemahnya komitmen dan kredibilitas anggota organisasi

3.1.2 Nasionalisme

Prinsip nasionalisme bangsa Indonesia dilandasi nilai-nilai Pancasila yang diarahkan agar bangsa Indonesia senantiasa: menempatkan persatuan kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kepentingan golongan; menunjukkan sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara; bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia serta tidak merasa rendah diri; mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia dan sesama bangsa; menumbuhkan sikap saling mencintai sesama manusia; mengembangkan sikap tenggang rasa.

Rasa kebangsaan adalah kesadaran berbangsa, yakni rasa yang lahir secara alamiah karena adanya kebersamaan sosial yang tumbuh dari kebudayaan, sejarah, dan aspirasi perjuangan masa lampau, serta kebersamaan dalam menghadapi tantangan sejarah masa kini. Wawasan kebangsaan mengandung pula tuntutan suatu bangsa untuk mewujudkan jati diri, serta mengembangkan perilaku sebagai bangsa yang meyakini nilai-nilai budayanya, yang lahir dan tumbuh sebagai penjelmaan kepribadiannya.

3.1.3 Etika Publik

Etika merupakan kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak atau nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Pelayanan Publik yang profesional membutuhkan tidak hanya kompetensi teknik dan leadership, namun juga kompetensi etika.

Adapun Nilai-nilai dasar etika publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang ASN, yakni sebagai berikut:

1. Memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi Negara Pancasila.
2. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.
3. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak.
4. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian.
5. Menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif.
6. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur.

7. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik.
8. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah.
9. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun.
10. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi.
11. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama.
12. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai.
13. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan.
14. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir.

3.1.4 Komitmen Mutu

Penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada layanan prima sudah tidak bisa ditawar lagi ketika lembaga pemerintah ingin meningkatkan kepercayaan publik. Sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 bahwa layanan untuk kepentingan publik menjadi tanggung jawab pemerintah. Cakupan komitmen mutu yang meliputi aspek efektivitas dan efisiensi, inovasi dan komitmen mutu.

3.1.5 Anti Korupsi

Secara harfiah istilah korupsi berarti segala macam perbuatan yang tidak baik, seperti yang dikatakan Andi Hamzah sebagai kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Korupsi bukan lagi sebuah kejahatan yang biasa, dalam perkembangannya korupsi telah terjadi secara sistematis dan meluas. Menimbulkan efek kerugian negara dan dapat menyengsarakan rakyat.

KPK bersama dengan para pakar telah melakukan identifikasi nilai-nilai dasar anti korupsi, dan dihasilkan sebanyak 9 nilai anti korupsi, yakni jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil.

3.2 KEDUDUKAN DAN PERAN ASN DALAM NKRI

3.2.1 Manajemen ASN

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja

pada instansi pemerintah, sedangkan yang dimaksud Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah pengelolaan pegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Konsep Manajemen ASN ini dikenal apa yang disebut dengan sistem merit. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan sedangkan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Manajemen PNS meliputi: penyusunan dan penetapan kebutuhan; pengadaan; pangkat dan Jabatan; pengembangan karier; pola karier; promosi; mutasi; penilaian kinerja; penggajian dan tunjangan; penghargaan; disiplin; pemberhentian; jaminan pensiun dan jaminan hari tua; dan perlindungan.

Sikap Perilaku Disiplin ASN

a. Pengertian Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Pengertian disiplin dapat dikonotasikan sebagai suatu hukuman, meskipun arti yang sesungguhnya tidaklah demikian. Disiplin berasal dari bahasa latin “*Disciplina*” yang berarti latihan atau pendidikan kesopanan dan kerohanian serta pengembangan tabiat. jadi sifat disiplin berkaitan dengan pengembangan sikap yang layak terhadap pekerjaan.

b. Kewajiban Pegawai Negeri Sipil

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010, Pegawai Negeri Sipil memiliki kewajiban untuk:

- 1) mengucapkan sumpah/janji PNS;

- 2) mengucapkan sumpah/janji jabatan;
- 3) setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
- 4) menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
- 6) menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS;
- 7) mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
- 8) memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
- 9) bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;
- 10) melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;
- 11) masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- 12) mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;
- 13) menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
- 14) memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
- 15) membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;
- 16) memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier; dan
- 17) menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

c. Larangan Pegawai Negeri Sipil

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010, Pegawai Negeri Sipil memiliki larangan untuk:

- 1) menyalahgunakan wewenang;
- 2) menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;

- 3) tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
- 4) bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;
- 5) memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- 6) melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
- 7) memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
- 8) menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
- 9) bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
- 10) melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
- 11) menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- 12) memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- 13) memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden;
- 14) memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- 15) memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

3.2.2 Whole Of Government

WoG adalah koordinasi-kolaborasi secara integratif serta manajemen berbagai tugas dan fungsi-fungsi di dalam organisasi tanpa adanya kontrol hierarkis di antara sesama partisipan yang ditujukan untuk memperoleh suatu hasil (*outcome*) yang tidak dapat dicapai apabila bekerja sendiri.

Berdasarkan interpretasi analitis dan manifestasi empiris di lapangan maka WoG (*Whole of Government*) didefinisikan sebagai “Suatu model pendekatan integratif fungsional satu atap” yang digunakan untuk mengatasi wicked problems yang sulit dipecahkan dan diatasi karena berbagai karakteristik atau keadaan yang melekat antara lain: tidak jelas sebabnya, multi dimensi, menyangkut perubahan perilaku.

3.2.3 Pelayanan Publik

Pelayanan adalah aktivitas yang dapat dirasakan melalui hubungan antara penerima dan pemberi pelayanan yang menggunakan peralatan berupa organisasi atau lembaga perusahaan. Dalam kamus Bahasa Indonesia (1990), pelayanan publik dirumuskan sebagai berikut :

- a. Pelayanan adalah perihal atau cara melayani.
- b. Pelayanan adalah kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli barang dan jasa.
- c. Pelayanan medis merupakan pelayanan yang diterima seseorang dalam hubungannya dengan pensegahan, diagnosa dan pengobatan suatu gangguan kesehatan tertentu.
- d. Publik berarti orang banyak (umum)

Pengertian publik menurut Inu Kencana Syafi’ie, adalah “Sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berfikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai- nilai norma yang mereka miliki”. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, diatur bahwa Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi

setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan kepentingan umum; kepastian hukum; kesamaan hak; keseimbangan hak dan kewajiban; keprofesionalan; partisipatif; persamaan perlakuan/tidak diskriminatif; keterbukaan; akuntabilitas; fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; ketepatan waktu; dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Adapun tujuan dari pelayanan publik adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik;
- c. Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan public sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

BAB IV

RANCANGAN AKTUALISASI

4.1 IDENTIFIKASI ISU

Berdasarkan proses observasi dan adaptasi selama sekitar empat bulan di wilayah kerja Puskesmas Bontang Barat, terdapat beberapa isu yang umumnya dihadapi. Isu tersebut merupakan kelemahan (*weakness*) yang perlu mendapatkan perhatian khusus.

1. Belum tertatanya program ISPA di Puskesmas Bontang Barat
2. Belum adanya metode pengarsipan yang tepat untuk kegiatan Program UKM
3. Kurang terorganisirnya pencatatan rekam medis pasien Diabetes Mellitus (DM)

4.2 ISU PRIORITAS

Berdasarkan pemetaan dan identifikasi isu yang telah dipaparkan, perlu dilakukan proses analisis isu untuk menentukan isu mana yang merupakan prioritas. Proses tersebut menggunakan alat bantu penetapan kriteria kualitas isu yakni berupa USG (*Urgency*, *Seriousness*, dan *Growth*)

Analisis USG (*Urgency*, *Seriousness*, dan *Growth*) mempertimbangkan tingkat kepentingan, keseriusan, dan perkembangan setiap variabel dengan kisaran skor 1-5.

- 1) *Urgency* (urgensi), yaitu dilihat dari tersedianya waktu, mendesak atau tidak masalah tersebut diselesaikan.
- 2) *Seriousness* (keseriusan), yaitu melihat dampak masalah tersebut terhadap produktivitas kerja, pengaruh terhadap keberhasilan, membahayakan sistem atau tidak, dan sebagainya.
- 3) *Growth* (berkembangnya masalah), yaitu apakah masalah tersebut berkembang sedemikian rupa sehingga sulit dicegah.

Tabel 4.1 Analisis Isu Strategis

No	Penilaian Masalah	Kriteria			Jumlah	Ranking
		U (1-5)	S (1-5)	G (1-5)		
1.	Belum tertatanya program ISPA di Puskesmas Bontang Barat	5	4	5	14	1
2.	Belum adanya metode pengarsipan yang tepat untuk kegiatan Program UKM	4	4	5	13	2
3.	Kurang terorganisirnya pencatatan rekam medis pasien Diabetes Mellitus (DM)	4	3	4	11	3

Berdasarkan hasil analisa isu menggunakan kriteria USG seperti tercantum pada tabel 4.1. Analisis Isu Strategis, ditetapkan isu prioritas yakni **Belum Tertatanya Program ISPA di Puskesmas Bontang Barat**.

4.3 ISU TERPILIH

Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) merupakan penyakit yang sering dijumpai pada anak-anak dengan keadaan ringan sampai berat. Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam menentukan penyakit ISPA dan pneumonia di Indonesia adalah masih terbatasnya data yang dapat dipercaya dan mutakhir. Hal ini disebabkan penyakit ISPA merupakan kelompok penyakit yang dapat menginfeksi pada berbagai lapisan masyarakat dan di berbagai daerah.

Menurut Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) 1995, tiga penyebab utama kematian bayi adalah infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), komplikasi perinatal, dan diare. Pada 2001, pola penyebab kematian bayi ini tidak banyak berubah dari periode sebelumnya komplikasi perinatal dan ISPA.

Penyakit ISPA menduduki peringkat pertama pada pola penyakit pasien rawat di RS tahun 2005. Angka kesakitan penduduk tersebut diperoleh melalui studi morbiditas, dan hasil pengumpulan data dari dinkes kabupaten/kota yang diperoleh dari pencatatan dan pelaporan sarana kesehatan, bahwa ISPA merupakan 10 penyakit terbanyak pada pasien rawat jalan di rumah sakit.

Berdasarkan riskesdas 2018 prevalensi penyakit menular, seperti ISPA turun dari 13.8% menjadi 4.4%, dan prevalensi pneumonia naik dari 1,6% menjadi 2%. Berdasarkan penelitian yang dilakukan M.Habibi dkk dalam Jurnal Epidemiologi Kesehatan Indonesia, faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) pada anak usia 12-59 bulan di Puskesmas Kelurahan Tebet Barat tahun 2013 adalah pendidikan dan pengetahuan pengawas anak, pendapatan keluarga, kepadatan hunian, dan perilaku merokok anggota keluarga.

Pada umumnya penyakit ISPA banyak terjadi pada anak-anak. Diperkirakan balita di Indonesia rata-rata mengalami sakit batuk dan pilek 3 sampai 6 kali pertahun. WHO memperkirakan kejadian pneumonia di Indonesia pada balita diperkirakan 10-20% pertahun.

Salah satu target *MDGs* adalah menurunkan angka kematian balita sebesar 2/3 balita. Balita merupakan penerus bangsa, sehingga tujuan *MDGs* mempunyai keselarasan dengan tujuan pembangunan kesehatan menuju Indonesia Sehat 2015.⁽¹⁾ Sejak tahun 2016, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*SDGs*) 2015-2030 secara resmi menggantikan Tujuan Pembangunan Millenium (*MDGs*) 2000-2015.⁽¹⁾ Salah satu target pembangunan kesehatan adalah mengakhiri kematian bayi dan balita yang dapat dicegah, berusaha menurunkan Angka kematian neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000 KH.

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan upaya kesehatan perseorangan (UKP) tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

Banyaknya kegiatan-kegiatan di Puskesmas Bontang Barat sering kali menyebabkan luputnya pelaksana program untuk memperbarui data dan menyimpan dokumentasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Tenaga kesehatan yang terbatas dengan tanggung jawab puskesmas sebagai penopang pelayanan kesehatan di wilayah kerja, seakan menuntut timbulnya kegiatan program yang strategis, yang mampu menjawab setiap permasalahan kesehatan yang ada.

Untuk itu dibutuhkan optimalisasi dalam perencanaan dan pelaksanaan Program ISPA di Puskesmas Bontang Barat sebagai bentuk adaptasi guna mempercepat tercapainya visi puskesmas yaitu terwujudnya puskesmas Bontang Barat Berpelayanan Prima dan Masyarakat Sehat yang Mandiri, melalui Misi meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan.

5 URAIAN KEGIATAN

1. Membuat *database* ISPA dan SOP data Pneumonia
2. Membuat video edukasi ISPA
3. Membuat *Leaflet* ISPA
4. Melakukan KIE ISPA

Tabel 4.2 Uraian Kegiatan

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output	Keterkaitan Substansi dengan Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Visi Misi Organisasi	Kontribusi Terhadap Tata Nilai Organisasi
1	2	3	4	5	6	7
1.	Membuat <i>database</i> ISPA dan SOP Pendataan ISPA Pneumonia	<p>1. Melakukan koordinasi dengan penanggung jawab Program ISPA sebelumnya</p> <p>2. Mengumpulkan data-data dan dokumentasi kegiatan-kegiatan ISPA</p> <p>3. Menganalisa desain format data yang sesuai dengan kebutuhan program ISPA</p> <p>4. Membuat format <i>database</i> ISPA dan SOP data Pneumonia</p> <p>5. Memasukkan data-data dan dokumentasi kegiatan ISPA</p>	<p><i>Database</i> ISPA- Pneumonia dan SOP Pendataan ISPA - Pneumonia</p>	<p>Akuntabilitas Pembuatan <i>database</i> ISPA untuk mengelola dan menyimpan data agar lebih transparan. Laporan kegiatan ISPA dapat dipercaya dan dipertanggung-jawabkan.</p> <p>Nasionalisme Melalui <i>database</i> ISPA diharapkan dapat menginspirasi sistem penghimpunan data ISPA di puskesmas lainnya. Sehingga tercipta data ISPA yang lebih real dengan cakupan wilayah yang lebih luas dan bermanfaat bagi semua.</p> <p>Etika Publik Dalam proses pembuatan dan penerapan <i>database</i> ISPA tidaklah mudah, dibutuhkan sikap jujur, rasa tanggung-jawab, dan berintegritas tinggi.</p>	<p>Sesuai dengan Visi Puskesmas Bontang Barat</p> <p>Terwujudnya Puskesmas Bontang Barat berpelayanan prima dan masyarakat sehat yang mandiri</p>	<p>Sesuai Tata Nilai Puskesmas</p> <p>Inovatif</p>

				<p>Komitmen Mutu <i>Database</i> ISPA merupakan kegiatan inovasi baru di Puskesmas Bontang Barat. Kegiatan ini membutuhkan sumber daya minimal dengan waktu relatif lebih singkat, namun menghasilkan data yang akurat, sehingga lebih efektif dan efisien.</p> <p>Anti Korupsi Dalam proses pembuatan <i>database</i> ISPA tidak dibutuhkan dana dan dilakukan secara sederhana. Meskipun demikian, penerapan kegiatan tersebut dilakukan secara jujur, disiplin, dan penuh tanggung jawab.</p>		
2	Membuat Video Edukasi ISPA	1. Menentukan materi edukasi ISPA	Video edukasi ISPA	<p>Akuntabilitas Materi video dipilih benar-benar sesuai dengan ilmu kedokteran, relevan di masyarakat, serta bersifat informatif</p>	Sesuai dengan Misi Puskesmas Bontang Barat	Sesuai Tata Nilai Puskesmas Inovatif

		<p>2. Mencari dan mengumpulkan video edukasi terkait ISPA</p> <p>3. Memutar video edukasi ISPA di ruang tunggu pasien</p>		<p>Nasionalisme Video edukasi yang ditayangkan dapat ditonton oleh seluruh pasien dan keluarga pasien tanpa membeda-bedakan.</p> <p>Etika Publik Dalam video edukasi tersebut juga ditayangkan hal-hal yang berkaitan dengan etika batuk, sebagai salah satu upaya pencegahan penyakit ISPA.</p> <p>Komitmen Mutu Edukasi ISPA melalui pemutaran video merupakan kegiatan inovasi di Puskesmas Bontang Barat, yang efektif dan efisien.</p> <p>Anti Korupsi Video edukasi ISPA merupakan metode yang sederhana.</p>	<p>Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan</p> <p>Mewujudkan kesadaran pembangunan masyarakat yang berwawasan kesehatan</p>	
3.	Membuat <i>Leaflet</i> ISPA	<p>1. Membuat materi ISPA</p> <p>2. Membuat desain <i>Leaflet</i></p> <p>3. Mencetak <i>Leaflet</i> ISPA</p> <p>4. Membagikan <i>Leaflet</i> ISPA</p>	<i>Leaflet</i> ISPA	<p>Akuntabilitas Materi <i>Leaflet</i> ISPA sesuai dengan ilmu kedokteran, relevan dengan</p> <p>Nasionalisme <i>Leaflet</i> ISPA Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar</p>	<p>Sesuai dengan Misi Puskesmas Bontang Barat</p> <p>Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan</p>	<p>Sesuai Tata Nilai Puskesmas</p> <p>Inovatif</p>

				<p>Etika Publik <i>Leaflet</i> ISPA menggunakan bahasa yang sopan dan mudah dimengerti</p> <p>Komitmen Mutu Penggunaan Bahasa yang mudah dipahami sehingga sosialisasi ISPA lebih efektif</p> <p>Anti Korupsi <i>Leaflet</i> ISPA diberikan ke setiap pengunjung Puskesmas Bontang Barat tanpa membeda-bedakan</p>	Mewujudkan kesadaran pembangunan masyarakat yang berwawasan kesehatan	
4	Melakukan KIE ISPA (Komunikasi, Informasi, Edukasi)	<p>1. Menentukan kriteria pasien yang perlu mendapatkan KIE ISPA Membuat tilikan KIE ISPA</p> <p>2. Melakukan koordinasi dengan teman sejawat mengenai KIE ISPA</p> <p>3. Melakukan konsultasi spesifik kepada orangtua pasien mengenai perjalanan</p>	Orangtua pasien memahami perjalanan penyakit ISPA dan upaya pencegahannya	<p>Akuntabilitas KIE dilakukan dengan memegang teguh prinsip etika kedokteran</p> <p>Nasionalisme KIE ISPA bersifat informatif, tidak memaksakan kehendak, dan menghargai hak orang lain.</p> <p>Etika Publik</p>	<p>Sesuai dengan Misi Puskesmas Bontang Barat</p> <p>Memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas</p> <p>Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan</p>	<p>Sesuai Tata Nilai Puskesmas</p> <p>Cerdas Empati Ramah</p>

	<p>penyakit dan upaya pencegahan ISPA</p> <p>4. Memberikan catatan di rekam medis pasien, sebagai bukti telah diberikan KIE ISPA</p>		<p>KIE dilakukan dengan memegang teguh prinsip etika kedokteran, dan disampaikan secara sopan santun</p> <p>Komitmen Mutu Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan pemahaman pasien tentang penyakit ISPA</p> <p>Anti Korupsi Tidak membeda-bedakan perlakuan pasien yang akan diberikan KIE.</p>	<p>Mewujudkan kesadaran pembangunan masyarakat yang berwawasan kesehatan</p>	
--	--	--	--	--	--

6 JADWAL KEGIATAN

Rancangan aktualisasi Optimalisasi Program Infeksi Saluran Pernapasan Akut akan dilaksanakan di Puskesmas Bontang Barat pada tanggal 13 September 2019 hingga 10 Oktober 2019.

Tabel 4.4 Jadwal Pelaksanaan Aktualisasi

No	Kegiatan	Minggu/Bulan ke-					Portofolio/ Bukti Kegiatan
		Sept-Oktober 2019					
		1	2	3	4	5	
1.	Membuat <i>Database</i> ISPA						Foto/video
2.	Membuat Video Edukasi ISPA						Foto/video
3.	Membuat <i>Leaflet</i> ISPA						Foto/video
4.	Melakukan KIE ISPA						

Keterangan :

A.  : Pelaksanaan Kegiatan

BAB V

HASIL KEGIATAN AKTUALISASI

Aktualisasi nilai-nilai dasar PNS sebagai dokter ahli pertama di Puskesmas Bontang Barat dilaksanakan mulai tanggal 4 September sampai dengan 26 Oktober 2019. Implementasi kegiatan yang dilakukan yaitu Optimalisasi Program Diseminasi Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di Puskesmas Bontang Barat. Dasar dari kegiatan aktualisasi ini terfokus pada upaya pencegahan promotif preventif penyakit ISPA.

Kegiatan aktualisasi ini terdiri dari enam kegiatan yang bertujuan untuk menginternalisasi dan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN yaitu berupa Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi sehingga mampu menjadi kebiasaan dalam bekerja dan akhirnya mampu melaksanakan tugas dan perannya secara bertanggung jawab profesional. Melalui kegiatan ini diharapkan Program ISPA di Puskesmas Bontang Barat dapat semakin berkembang secara optimal dan berdampak secara tidak langsung pada kesadaran serta perilaku masyarakat untuk mencegah penyakit infeksi menular khususnya ISPA. Adapun keenam kegiatan aktualisasi adalah sebagai berikut:

1. Membuat video edukasi ISPA
2. Membuat *Leaflet* ISPA
3. Melakukan KIE ISPA
4. Membuat *Database* ISPA dan SOP Pneumonia
5. Penyuluhan ISPA
6. Pendalaman Epidemiologi ISPA

5.1. Membuat Video Edukasi ISPA

Video Edukasi ISPA merupakan kegiatan promosi kesehatan yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada pengunjung puskesmas mengenai Infeksi Saluran Pernapasan. Video tersebut meliputi penjelasan secara umum terkait penyakit ISPA, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya ISPA, serta upaya pencegahan penyakit ISPA.

Video diputar secara silih berganti berdasarkan waktu yang sudah dijadwalkan. Tayangan video dapat dinikmati oleh setiap pengunjung tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, budaya dan jaminan pasien. Selain itu, video edukasi bermanfaat untuk mengisi waktu pasien selama menunggu urutan antrian pelayanan dan mencegah timbulnya

kejenuhan.

Pelaksanaan pemutaran video edukasi berjalan sesuai dengan rancangan aktualisasi. Diawali dengan menentukan materi edukasi ISPA, melalui membaca referensi-referensi terbaru mengenai penyakit ISPA. Kedua, mencari dan mengumpulkan video edukasi terkait ISPA. Pencarian dilakukan melalui *website youtube.com*. didapatkan sebanyak tujuh video. Ketiga, memutar video edukasi ISPA di ruang tunggu pasien. Agar pemutaran video edukasi ISPA dapat berkelanjutan, perlu dilakukan koordinasi dengan staf apotek untuk bertugas memutar video edukasi sebelum pelayanan dimulai.

Kegiatan pemutaran video edukasi ISPA berjalan lancar, dengan sedikit kendala. Kendala yang ditemukan yaitu petugas staf apotek yang sesekali terlupa untuk memutar video edukasi di awal pelayanan, sehingga terlambat. Solusi untuk hal tersebut yaitu dengan melakukan evaluasi di pertemuan UKP Puskesmas Bontang Barat (Upaya Kesehatan Perorangan).

5.1.1. Tahapan Kegiatan

1. Menentukan materi edukasi ISPA
2. Mencari dan mengumpulkan video edukasi terkait ISPA
3. Memutar video edukasi ISPA di ruang tunggu pasien

5.1.2. Nilai dasar ANEKA

1. Akuntabilitas

Materi video dipilih benar-benar sesuai dengan ilmu kedokteran, relevan di masyarakat, serta bersifat informatif.

2. Nasionalisme

Video edukasi yang ditayangkan dapat ditonton oleh seluruh pasien dan keluarga pasien tanpa membeda-bedakan.

3. Etika Publik

Dalam video edukasi tersebut juga ditayangkan hal-hal yang berkaitan dengan etika batuk, sebagai salah satu upaya pencegahan penyakit ISPA

4. Komitmen Mutu

Edukasi ISPA melalui pemutaran video merupakan kegiatan inovasi di Puskesmas Bontang Barat, yang efektif dan efisien.

5. Anti Korupsi

Video edukasi ISPA merupakan metode yang sederhana dan dapat ditonton oleh setiap pengunjung puskesmas tanpa membeda-bedakan.

5.1.4. Visi dan Misi Puskesmas

Kegiatan ini sesuai dengan Misi Puskesmas Bontang Barat yaitu “Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan” dan “Mewujudkan kesadaran pembangunan masyarakat yang berwawasan kesehatan”.

5.1.5. Kendala dan Strategi

5.1.5.1. Kendala

1. Staf Apotek sesekali tidak memutar video edukasi ISPA di awal waktu pelayanan.
2. Letak TV ruang tunggu yang kurang strategis.

5.1.5.2. Strategi

1. Melakukan koordinasi dan evaluasi secara berkala setiap bulan.
2. Mengatur tata suara TV ruang tunggu.

5.1.6. Dokumentasi



Gambar 5.1.1



Gambar 5.1.2



Gambar 5.1.3

Gambar 5.1.1-5.1.3
Pemutaran video edukasi di ruang tunggu Puskesmas Bontang Barat

5.2. Membuat *Leaflet* ISPA

Proses kegiatan pembuatan *Leaflet* ISPA berjalan dari tanggal 25 September hingga 21 Oktober 2019. Materi yang diangkat terfokus pada upaya pencegahan ISPA yang dikemas dalam desain *leaflet* yang menarik. *Leaflet* dicetak sebanyak 50 lembar yang kemudian dipajang di meja pusat informasi Puskesmas Bontang Barat. *Leaflet* dapat diakses ataupun diambil oleh pengunjung puskesmas secara gratis dan tanpa membeda-bedakan.

5.2.1. Tahapan Kegiatan

1. Membuat materi ISPA
2. Membuat desain *Leaflet* ISPA
3. Mencetak *Leaflet* ISPA
4. Membagikan *Leaflet* ISPA

5.2.2. Nilai Dasar ANEKA

1. Akuntabilitas (Kosistensi)

Materi *Leaflet ISPA* sesuai dengan ilmu kedokteran dan relevan di masyarakat.

2. Nasionalisme

Leaflet ISPA menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar.

3. Etika Publik

Leaflet ISPA menggunakan Bahasa yang sopan dan mudah dimengerti.

4. Komitmen Mutu

Penggunaan Bahasa yang mudah dipahami sehingga sosialisasi ISPA efektif.

5. Anti Korupsi

Leaflet ISPA dapat diambil dan dibaca oleh setiap pengunjung Puskesmas Bontang Barat tanpa membeda-bedakan.

5.2.3. Visi dan Misi Organisasi

Kegiatan membuat *Leaflet ISPA* ini sesuai dengan Misi Puskesmas Bontang Barat yaitu “Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan” dan “Mewujudkan kesadaran pembangunan masyarakat yang berwawasan kesehatan”.

5.2.4. Kendala dan Strategi

5.2.4.1. Kendala

1. Dikhawatirkan menimbulkan sampah

5.2.4.2. Strategi

1. Untuk kedepannya membuat *Leaflet* yang tidak hanya menarik, namun membuat *Leaflet* yang bisa bermanfaat lain sehingga tidak langsung menjadi sampah setelah selesai dibaca.
2. Mengoptimalkan media sosial dan bekerja sama dengan penanggung jawab UKM Promkes.

5.2.5. Dokumentasi



Gambar 5.2.1



Gambar 5.2.2



Gambar 5.2.3

Gambar 5.2.1-5.2.3. Leaflet ISPA di Pusat Informasi Puskesmas Bontang Barat

5.3. Membuat Database dan SOP ISPA

Proses pembuatan *Database* dan SOP ISPA dimulai sejak tanggal 15 September hingga 25 September sesuai tahapan perencanaan. *Database* dibuat menggunakan metode digital yang masih sederhana yaitu google drive, dengan kapasitas maksimal 15Gb. *Database* ISPA sejauh ini hanya dapat diakses oleh PJ ISPA-Pneumonia untuk menyimpan arsip secara digital sehingga data program ISPA dapat terkumpul secara rapi dan aktual. Penginputan *Data base* dilakukan tanggal 17 September-15 Oktober 2019.

SOP ISPA dibuat oleh PJ ISPA dengan melakukan koordinasi dengan PJ sebelumnya. SOP dibuat untuk menjadi acuan baku pendataan dan pelaporan rutin pasien ISPA-Pneumonia Puskesmas Bontang Barat. Kemudian, PJ ISPA-Pneumonia melakukan sosialisasi SOP pendataan pasien ISPA-Pneumonia kepada dokter-dokter

Puskesmas Bontang Barat.

5.3.1. Tahapan Kegiatan

1. Koordinasi dengan Penanggung Jawab Program ISPA sebelumnya dan petugas Puskesmas Bontang Barat
2. Pengumpulan data-data dan dokumentasi kegiatan ISPA
3. Analisa format dan pembuatan desain data yang sesuai dengan kebutuhan program ISPA
4. Sosialisasi dan koordinasi SOP ISPA kepada petugas terkait yaitu dokter-dokter, perawat, dan admin poli rawat jalan puskesmas.

5.3.2. Nilai dasar ANEKA

1. Akuntabilitas

Pembuatan *database ISPA* untuk memudahkan dalam mengelola dan menyimpan data. Laporan kegiatan ISPA yang dibuat dapat dipercaya dan dipertanggung-jawabkan.

2. Nasionalisme

Melalui *database ISPA* diharapkan dapat menginspirasi sistem penghimpunan data ISPA di puskesmas lainnya. Sehingga data ISPA yang didapatkan lebih nyata dengan cakupan wilayah yang lebih luas dan bermanfaat bagi semua.

3. Etika Publik

Dalam proses pembuatan dan penerapan *database ISPA* tidaklah mudah, dibutuhkan sikap jujur, rasa tanggung-jawab, dan berintegritas tinggi.

4. Komitmen Mutu

Database ISPA merupakan kegiatan inovasi di Puskesmas Bontang Barat. Kegiatan ini membutuhkan sumber daya minimal dengan waktu yang relatif lebih singkat, namun menghasilkan data yang akurat, sehingga lebih efektif dan efisien.

5. Anti korupsi

Dalam proses pembuatan *database ISPA* tidak dibutuhkan dana dan dilakukan secara sederhana. Meskipun demikian, penerapan kegiatan tersebut dilakukan secara jujur, disiplin, dan penuh tanggung jawab.

5.3.3. Visi dan Misi Organisasi

Kegiatan ini sesuai dengan Visi Puskesmas yaitu “Terwujudnya Puskesmas Bontang Barat Berpelayanan Prima dan masyarakat sehat dan mandiri”.

5.3.4. Kendala dan Strategi

5.3.4.1. Kendala :

Sistem teknologi yang digunakan masih sangat sederhana, sehingga membutuhkan waktu yang cukup banyak untuk memperbaharui *database*.

5.3.4.2.Strategi

Menganalisa lebih lanjut dengan ahli IT, Penanggung Jawab Program UKM, serta Kepala Puskesmas mengenai pembuatan pengarsipan data digital Puskesmas sehingga data, laporan, dan dokumentasi kegiatan program ISPA maupun program lainnya dapat disederhanakan menggunakan teknologi yang lebih baik.

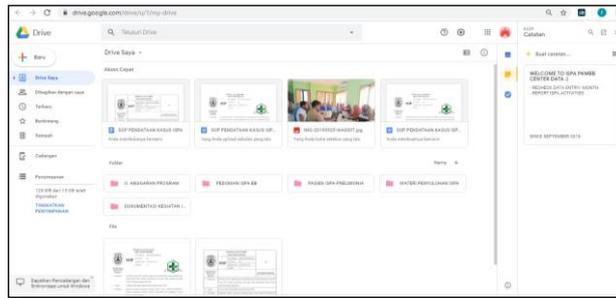
5.3.5. Dokumentasi



Gambar 5.3.1



Gambar 5.3.2



Gambar 5.3.3

5.4. Melakukan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) ISPA

Kegiatan KIE umumnya sudah dilakukan oleh dokter dalam menangani pasien di pelayanan poli rawat jalan. Namun kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan lagi cakupan pasien yang dilakukan KIE ISPA. **Melalui kegiatan KIE ISPA ini, diharapkan pasien yang berobat tidak hanya pulang membawa obat dari dokter. Melainkan juga membawa informasi terkait penyakit ISPA yang dideritanya dan mengetahui upaya untuk pencegahan ISPA agar tidak berulang.**

5.4.1 Tahapan Kegiatan

1. Menentukan kriteria pasien yang perlu mendapatkan KIE ISPA
2. Melakukan koordinasi dengan teman sejawat tentang KIE ISPA

5.4.2. Nilai dasar ANEKA

1. Akuntabilitas

KIE dilakukan dengan memegang teguh prinsip etika kedokteran.

2. Nasionalisme

KIE ISPA bersifat informative, tidak memaksakan kehendak, dan menghargai hak orang lain.

3. Etika Publik

KIE disampaikan dengan cara yang sopan dan santun.

4. Komitmen Mutu

Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada pasien tentang penyakit ISPA.

5. Anti Korupsi

Tidak membedakan perlakuan pasien yang akan diberikan KIE.

5.4.3. Visi dan Misi Organisasi

Kegiatan ini sesuai dengan Misi Puskesmas Bontang Barat “Memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas” , Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan”, dan “Mewujudkan kesadaran pembangunan masyarakat yang berwawasan kesehatan”.

5.4.4. Kendala dan Strategi

5.4.4.1. Kendala

Terdapat sedikit kendala dalam implementasi kegiatan ini, yaitu antrian pasien yang sangat banyak. Sehingga dapat menyebabkan penyampaian KIE ISPA sedikit terburu oleh waktu.

5.4.4.2. Strategi

Menggunakan waktu pemeriksaan pasien secara efektif untuk memberikan KIE kepada pasien.

5.4.5. Dokumentasi

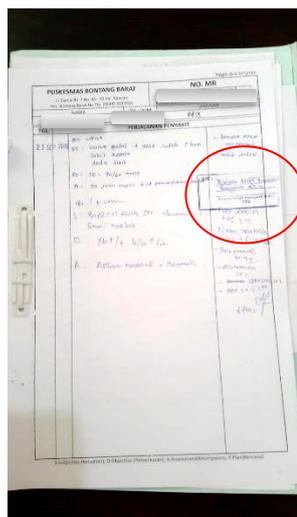


Gambar 5.4.1

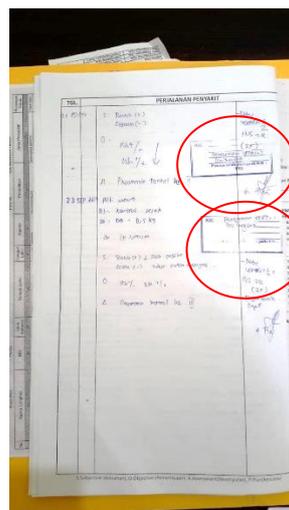


Gambar 5.4.2

Gambar 5.4.1 dan 5.4.2. Koordinasi KIE ISPA dengan dokter-dokter Puskesmas Bontang Barat



Gambar 5.4.3



Gambar 5.4.4

Gambar 5.4.3 dan 5.4.4. Bukti rekam medik pasien telah diberikan KIE ISPA



Gambar 5.4.5. KIE Pencegahan ISPA berulang di Poli Puskesmas Bontang Barat

5.5. Pendalaman Epidemiologi (PE) dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Pneumonia

Kegiatan PE Pneumonia merupakan kegiatan Program ISPA untuk melakukan kunjungan rumah pasien-pasien yang menderita ISPA khususnya Pneumonia. PE umumnya ditujukan kepada pasien Pneumonia yang tidak disiplin melakukan kontrol kembali ke puskesmas. Namun untuk mencapai hasil yang optimal, PE dilakukan pada seluruh pasien Pneumonia, setelah menjalani terapi atau pengobatan, baik pengobatan rawat jalan maupun rawat inap. Tujuan dari kunjungan tersebut tidak hanya untuk memeriksa pasien namun juga untuk mencari faktor-faktor risiko yang dapat mencetuskan keluhan ulangan atau memperberat keluhan di dalam lingkungan rumah pasien.

Kegiatan PE Pneumonia umumnya dilakukan bersama dengan PMT Pneumonia

(Pemberian Makanan Tambahan). PMT Pneumonia yang diberikan yaitu berupa susu dan biskuit yang diharapkan dapat mempertahankan atau meningkatkan status gizi balita yang menderita pneumonia.

5.5.1. Tahapan Kegiatan

1. PJ Program ISPA mendapatkan laporan kasus Pneumonia anak usia balita
2. PJ Program ISPA meminta data identitas pasien disertai kontak aktif orangtua dan juga alamat domisili
3. PJ Program ISPA melakukan KIE dan koordinasi jadwal kunjungan ke rumah/ PE Pneumonia
4. PJ Program ISPA melakukan kunjungan ke rumah/ PE Pneumonia dan memberikan makanan tambahan

5.5.2. Dampak akan nilai ANEKA diimplementasikan :

1. **Akuntabilitas**
Kegiatan PE dan PMT dilakukan ke seluruh pasien pneumonia secara terkontrol dan tercatat dengan baik.
2. **Nasionalisme**
PE dan PMT Pneumonia dilakukan untuk seluruh pasien pneumonia secara adil, tanpa membeda-bedakan.
3. **Etika Publik**
PE dan PMT Pneumonia dilakukan dengan rasa penuh tanggung jawab, berintegritas tinggi, dan sopan santun. Hasil dari identifikasi dari PE Pneumonia dijamin kerahasiaannya.
4. **Komitmen Mutu**
Kegiatan ini merupakan bentuk kegiatan program yang berorientasi mutu, yaitu dengan melakukan penilaian ulang pasien yang telah berobat, survey lingkungan rumah, dan dukungan pemberian makanan tambahan saat melakukan kunjungan.
5. **Anti Korupsi**
Kegiatan ini dilakukan secara penuh tanggung jawab dan jujur.

5.5.3. Visi dan Misi Organisasi

Kegiatan ini sesuai dengan Misi Puskesmas Bontang Barat “Memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas”.

5.5.4. Kendala dan Strategi

5.5.4.1. Kendala

1. Kendala cuaca kurang mendukung untuk kunjungan ke rumah pasien
2. Kontak pasien/ orangtua yang tidak aktif
3. Menyesuaikan jadwal pelayanan dengan jadwal kunjungan pasien
4. Susu PMT Pneumonia yang tidak sesuai dengan usia pasien

5.5.4.2.Strategi

1. Mengatur ulang jadwal kunjungan saat cuaca tidak mendukung
2. Meminta kontak pasien/ orangtua pasien yang aktif
3. Mengatur jadwal saat pasien berkunjung pertama di puskesmas
4. Melakukan koordinasi untuk perencanaan PMT Pneumonia kedepannya sesuai dengan usia pasien pneumonia

5.5.5. Dokumentasi



Gambar 5.5.1



Gambar 5.5.2



Gambar 5.5.3



Gambar 5.5.4



Gambar 5.5.5

Gambar 5.5.1-5.5.5. Kegiatan pendalaman epidemiologi pasien ISPA

5.6. Penyuluhan Pencegahan ISPA

Kegiatan ini merupakan kegiatan tambahan dalam bentuk penyuluhan pencegahan ISPA ke lapangan. Kegiatan aktualisasi ini dilakukan sebanyak dua kali, yaitu pada tanggal 25 September 2019 di SDN 002 Bontang Barat dan tanggal 27 September di Panti Asuhan Putri Aisyiah.

5.6.1. Tahapan Kegiatan

1. Membuat materi penyuluhan pencegahan ISPA
2. Melakukan koordinasi dengan pihak sekolah SDN 002 Bontang Barat/ Panti Asuhan Aisyiah
3. Penyuluhan Pencegahan ISPA di SDN 002 Bontang Barat dan Panti Asuhan Aisyiah

5.6.2. Nilai dasar ANEKA

1. Akuntabilitas

Penyuluhan pencegahan ISPA bersifat informatif yaitu memberikan informasi-informasi kesehatan untuk mencegah penyakit ISPA. Materi yang dibuat dapat dipertanggung-jawabkan, dan relevan dengan disiplin ilmu kedokteran. Materi yang diberikan disesuaikan pula dengan latar belakang peserta.

2. Nasionalisme

Penyuluhan kesehatan ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial sebagai pemegang program ISPA di Puskesmas Bontang Barat, menyampaikan informasi tentang pencegahan ISPA terutama di daerah yang berisiko terjadinya ISPA.

3. Etika Publik

Penyampaian informasi dilakukan secara jujur, berintegritas tinggi dan menjaga sopan santun.

4. Komitmen Mutu

Penyuluhan pencegahan ISPA merupakan inovasi Program ISPA yang efektif dan efisien untuk dilakukan saat ini.

5. Anti korupsi

Kegiatan penyuluhan ini menggunakan metode sederhana dan dilaksanakan dengan rasa tanggung jawab dan kejujuran.

5.6.3. Visi dan Misi Organisasi

Kegiatan ini sesuai dengan Visi Puskesmas Bontang Barat “ Mewujudkan Puskesmas Bontang Barat berpelayanan prima dan masyarakat sehat yang mandiri” serta Misi “Memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas”, “Mewujudkan kesadaran pembangunan masyarakat yang berwawasan kesehatan”.

5.6.4. Kendala dan Strategi

5.6.4.1. Kendala

Tidak ditemukan kendala yang bermakna dalam pelaksanaan penyuluhan pencegahan ISPA di sekolah SDN 002 Bontang Barat dan Panti Asuhan Aisyiah.

5.6.4.2.Strategi

Penyuluhan ISPA dapat dilakukan di tempat lainnya.

5.6.5. Dokumentasi



Gambar 5.6.1



Gambar 5.6.2

Gambar 5.6.1 dan 5.6.2. Penyuluhan pencegahan ISPA di SDN 002 Bontang Barat



Gambar 5.6.3



Gambar 5.6.4

Gambar 5.6.1 dan 5.6.4. Penyuluhan pencegahan ISPA di Panti Asuhan Aisyiah

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Dalam pelaksanaan kegiatan aktualisasi tidak semua berlangsung sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan dikarenakan bersamaan dengan kegiatan seperti Survey Reakreditasi Puskesmas Bontang Barat. Meskipun demikian, kegiatan aktualisasi berlangsung dengan lancar dan baik, serta selesai tepat pada waktu yang telah direncanakan.

Optimalisasi Diseminasi Program ISPA merupakan salah satu bentuk implementasi nilai-nilai dasar sebagai ASN yaitu Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi. Pelaksanaan kegiatan aktualisasi yang sederhana ini diharapkan ini menjadi salah satu penunjang dalam mewujudkan pencapaian Visi Puskesmas yaitu “Terwujudnya Puskesmas Bontang Barat Berpelayanan Prima dan Masyarakat Sehat yang Mandiri” dengan Misi Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat tentang Kesehatan, Memberikan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas, dan Mewujudkan Kesadaran Pembangunan Masyarakat yang Berwawasan Kesehatan.

6.2. Saran

- 6.2.1. Penguatan kembali nilai-nilai ANEKA dalam setiap pertemuan maupun rapat internal Puskesmas Bontang Barat. Hal tersebut bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja baik sebagai ASN.
- 6.2.2. Perlu dilakukannya bimbingan teknis terkait manajemen puskesmas kepada ASN yang berada di Puskesmas Bontang Barat.

6.2.3. Rencana Tindak Lanjut

- 6.2.3.1. Membuat Video Edukasi ISPA
 - Pembaharuan video setiap setahun sekali
 - Koordinasi dengan PJ program-program UKM
 - Koordinasi tata letak monitor TV agar lebih strategis
- 6.2.3.2. Membuat *Leaflet* ISPA
 - Membuat desain *leaflet* yang multi fungsi

- 6.2.3.3. Membuat *database* dan SOP ISPA
- Koordinasi dengan PJ UKM untuk pembuatan *database* digital
- 6.2.3.4. Melakukan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) ISPA
- Koordinasi dan evaluasi bersama dengan dokter puskesmas Bontang Barat jumlah kunjungan ISPA dan kegiatan KIE pasien ISPA.
- 6.2.3.5. Pendalaman Epidemiologi (PE) dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Pneumonia
- PE Pneumonia sebaiknya dilakukan oleh dua orang staf puskesmas
 - PMT Pneumonia berupa susu dan biskuit dapat diganti dengan makanan sesuai dengan usia pasien
- 6.2.3.6. Penyuluhan Pencegahan ISPA
- Pembuatan rancangan anggaran untuk pengadaan hadiah di kegiatan Penyuluhan Pencegahan ISPA agar lebih semarak.

DAFTAR PUSTAKA

- Lembaga Administrasi Negara. (2015). *Modul Diklat Prajabatan CPNS Golongan I dan II Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar Profesi Pegawai Negeri Sipil*. Lembaga Administrasi Negara, Jakarta.
- Lembaga Administrasi Negara. (2015). *Modul Diklat Prajabatan CPNS Golongan I dan II : Akuntabilitas*. Lembaga Administrasi Negara, Jakarta.
- Lembaga Administrasi Negara. (2015). *Modul Diklat Prajabatan CPNS Golongan I dan II : Nasionalisme*. Lembaga Administrasi Negara, Jakarta.
- Lembaga Administrasi Negara. (2015). *Modul Diklat Prajabatan CPNS Golongan I dan II : Etika Publik*. Lembaga Administrasi Negara, Jakarta.
- Lembaga Administrasi Negara. (2015). *Modul Diklat Prajabatan CPNS Golongan I dan II : Komitmen Mutu*. Lembaga Administrasi Negara, Jakarta.
- Lembaga Administrasi Negara. (2015). *Modul Diklat Prajabatan CPNS Golongan I dan II : Anti Korupsi*. Lembaga Administrasi Negara, Jakarta.
- Lembaga Administrasi Negara. (2017). *Modul Pelatihan Dasar Calon PNS Pelayanan Publik*. Lembaga Administrasi Negara, Jakarta.
- Lembaga Administrasi Negara. (2017). *Modul Pelatihan Dasar Calon PNS Manajemen Aparatur Sipil Negara*. Lembaga Administrasi Negara, Jakarta.
- Lembaga Administrasi Negara. (2017). *Modul Pelatihan Dasar Calon PNS Whole of Government*. Lembaga Administrasi Negara, Jakarta.
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. (2017). *Modul Pendidikan dan Pelatihan Dasar Calon PNS Habitiasi*. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Jakarta.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2010. Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Indonesia. Jakarta (E-book). (<http://gizi.depkes.go.id/wp-content/uploads/2011/10/lap-pemb-milenium-ind-2010.pdf>)
- Simoes EAF, Cherian T, Chow J, et al. *Acute Respiratory Infection in Children*. In: Jamison DT, Breman JG, Measham AR, et al., editors. *Disease Control Priorities in Developing Countries*. 2nd edition. Washington (DC): World bank; 2006. Chapter 25. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK11786/>
- Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Depkes RI. 2009. Riskesdas Laporan Nasional tahun 2007. Jakarta